



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ARIEF S. TRINUGROHO
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Pihak Kesatu,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP 196411271990031002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah penetapan batas wilayah antar Provinsi	10 Pilar
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,5
3	Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang berintegritas	Jumlah kerjasama yang terealisasi	25 Dokumen
4	Penguatan sistem kinerja dan tatalaksana pemerintahan	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%
	Peningkatan Kebebasan sipil	Proposal permohonan belanja hibah yang ditindaklanjuti	75%
5	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu	1190 Produk hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	40 produk hukum
6	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan	25 perkara
		Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM	15 Kasus/Masalah
7	Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan Perekonomian makro dan mikro yang diimplementasikan	67%
		Persentase pembinaan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50%
		Peningkatan penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	20 BLUD
8	Mewujudkan proses dan pelayanan/layanan pengadaan secara elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		Persentase pemenuhan 17 standarisasi LPSE	100%
9	Menciptakan Kebijakan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kebijakan yang di tetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan Daerah	20 Kebijakan
		Persentase realisasi fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %

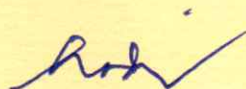
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	4,35 (A-)
		Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11,75
11	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100%
12	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100%
13	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 318.345.000.312	APBD
2	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 4.395.163.966	APBD
3	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.090.243.785	APBD
4	Kesejahteraan Rakyat	Rp 428.609.376.505	APBD
5	Penataan Organisasi	Rp 3.647.438.101	APBD
6	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 16.909.349.795	APBD
7	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 4.388.119.679	APBD
8	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 3.705.192.901	APBD
TOTAL		Rp 783.089.885.044	

Medan,

2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,



ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP 196411271990031002